BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Irak adalah salah satu negara penting di kawasan Timur Tengah dan juga berperan sebagai stabilitas dan keamanan kawasan. Irak menunjukkan dua sikap berbeda dalam kebijakan luar negeri. Sikap pertama ketika Irak berada di bawah sistem monarki memiliki kedekatan erat dengan Iran dan Arab Saudi melalui ikatan rezim monarki tradisional dan berkolaborasi regional yang berorientasikan kebijakan luar negeri pro-Barat. Pasca runtuhnya rezim monarki ditandai dengan kudeta yang dilakukan oleh Saddam Hussein dengan rezim Ba'ath nya telah merubah total kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran. Dibawah pemerintahan Saddam Hussein. Pada tahun 1988 isu kebijakan luar negeri utama Irak adalah perang terhadap Iran. Perang ini dimulai pada bulan September 1980, ketika Saddam Husein mengirim pasukan Irak di seluruh Shatt al Arab ke barat daya Iran. Alasan Saddam Husein untuk menyerang Iran karena revolusi islam di Iran memiliki pengaruh terhadap Irak yang mayoritas masyarakatnya didominasi Syiah. Meskipun perang adalah beban berat pada Irak secara politik, ekonomi, dan sosial, dampaknya mempengaruhi terhadap pola hubungan luar negeri Irak terhadap Iran (Vaezi,2010:6)

Tumbangnya rezim Saddam Hussein memberikan kesempatan dan tempat bagi bangkitnya kekuatan politik Syiah di Irak. Pasca terpilihnya pemerintahan

Ibrahim jaafari. Jaafari adalah pemimpin Syiah yang puluhan tahun berada di pengasingan melawan rezim Saddam Hussein. Ibrahim al-Jaafari Eshaiker adalah politikus Irak yang menjadi perdana menteri Irak pada pemerintah transisi Irak 2005-2006. Dia adalah salah satu dari dua wakil presiden Irak di bawah pemerintah interim Irak 2004- 2005, dan juru bicara utama untuk Islamic Dawa Party. Jaafari lahir dari keluarga terpandang yang mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Kakek buyutnya, Mahdi bin Ali bin Baqir al-Eshaiker, merupakan pemimpin pemberontakan Al- Eshaiker di Karbala pada 1876 melawan Kekaisaran Ottoman. Jaafari menyadari bahwa ia adalah perdana menteri seluruh rakyat Irak, termasuk kaum perempuan, Sunni dan kaum sekuler. Jaafari membuktikan otoritasnya terhadap intrik para politisi dan ulama Syiah yang tidak segan-segan mengkritiknya. Perkembangan politik Irak dan kebijakan luar negeri Irak pada Ibrahim Jaafari terhadap Iran berupaya menunjukkan Irak sebagai negara yang ramah terhadap kawasan. Irak baru pasca invasi AS memiliki pola kebijakan luar negeri terhadap Iran yang ramah (http://www.cfr.org/iraq/iraq-ibrahim-jaafari/p8035 diakses pada 23 Maret 2015)

Irak dimasa Saddam Hussein yang disebut sebagai penyeimbang Iran di kawasan Teluk Persia dibawah Jaafari menjadi penyeimbang kepentingan antara kedua negara. Bagi Ibrahim Jaafari Iran dengan kekuasaan dan pengaruhnya di Irak dan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kepentingan keamanan nasional Irak. Meskipun Iran adalah negara non Arab, isu keamanan Irak juga berkaitan dengan Iran. Meningkatnya hubungan Iran dan Irak menimbulkan

kekhawatiran bagi Arab Saudi ditengah menguatya pengaruh Iran di Irak. Arab Saudi khawatir kehadiran pasukan ini akan mengambil kendali pemerintah Irak dan membuat Irak melupakan persahabatannya dengan Saudi. Jaafari juga menegaskan pihaknya berusaha untuk terus memperbaiki hubungan Irak Arab Saudi dan menyambut Arab Saudi untuk sama sama membangun Irak. ”Iran memang mengirim tentaranya ke sini, namun tidak ikut campur dalam kedaulatan Irak. Irak ingin hubungan dengan Arab Saudi dan Iran berjalan seimbang http://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed diakses pada 23 Maret 2015).

Namun perubahan kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran mengalami perubahan pasca naiknya kubu Iyad Alawi dalam tampuk kepemimpinan Irak. Iyad Alawi dikenal sebagai tokoh syiah sekuler namun sangat anti akan pengaruh Iran di Irak dan ia mendapat dukungan dari Arab saudi dan Amerika serikat. Kemenangan Alawi dalam pemilu Irak dianggap sebagai kemenangan kelompok anti Iran di Irak dan membatasi pengaruh Iran di Irak. Banyak elit politik Syiah Irak tinggal di pengasingan di Iran selama bertahun-tahun selama pemerintahan Saddam. Allawi, sebaliknya, menghabiskan sebagian besar tahun di pengasingan di Inggris.

Negara Arab Sunni yang khawatir akan menguatnya pengaruh Iran karena pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan naiknya Alawi pengaruh Iran di Irak dapat direduksi. Alawi membangkitkan sentimen anti Iran dan meningkatkan nasionalisme Arab diantara warga Irak .Alawi menganggap Iran

mendikte kebijakan luar negeri Irak dan memperoleh keuntungan atas Irak yang didominasi oleh pemerintahan syiah. Alawi juga memiliki kebijakan mendukung oposisi dalam negeri Iran untuk memberi pengakuan, memberi jaminan politik, memberikan dukungan politik bagi oposisi Iran di forum internasional. Berbeda dengan kebijakan luar negeri Jaafari yang menjadikan Iran sebagai faktor penting dalam keamanan Irak Alawi sebaliknya menganggap Iran sebagai malapetaka di Timur Tengah dan ikut campur tangan dalam proses politik di Irak. Menurut Alawi Iran telah menghasut kerusuhan di Irak, Lebanon dan di antara warga Palestina. Menurut Alawi negara-negara Timur Tengah telah menjadi korban dari kelompok-kelompok ekstremis dan teroris yang didanai oleh Iran. Menurut Alawi Iran sedang berusaha mengubah proses politik di Irak agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Iran dan menanam pengaruh Iran di Irak (http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/22/allawi-cites-dictatorship-iranian-control-iraq/ diakses pada 23 Maret 2015).

Namun kebijakan luar negeri Irak yang anti Iran tidak berlangsung lama, Pasca pemilu 2005 yang dimenangkan oleh Maliki Irak menjalin hubungan yang baik dengan Iran yang tidak terjadi dimasa pemerintahan alawi. Menurut Maliki hubungan Irak dan Iran terjalin karena kedua bangsa ini hidup berdampingan. Dua bangsa Iran dan Irak sudah sejak lama hidup bersama dan menjalin hubungan-hubungan ekonomi dan kebudayaan.

Agama Islam merupakan jembatan terpenting yang mempertemukan kedua rakyat ini. Dari jembatan inilah terjalin pula ikatan-ikatan lain. Sebagai

contoh, keberadaan makam-makam suci para imam syiah, seperti makam Imam Ali dan Imam Husein , juga sejumlah keturunan dan cucu-cucu nabi muhammad di Irak, menjadi pusat perhatian yang sangat kuat bagi warga Iran sehingga tiap tahunnya sejumlah besar rakyat Iran pergi ke Irak untuk berziarah ke makam-makam suci tersebut. Di Iran juga terdapat makam beberapa tokoh dari keturunanan nabi Muhammad SAW diantaranya makan Imam Ali Ar-Ridho di Masyhad, makam Sayidah Fatimah Ma'shumah di kota Qom, dan beberapa makam lain, sehingga rakyat Irak pun banyak berdatangan ke Iran untuk berziarah ke makam-makam suci ini. Saling kunjung dan ziarah ini, yang telah berjalan sejak dulu kala, menciptakan hubungan kedua bangsa ini. Selain itu, kunjungan-kunjungan ziarah ini memiliki peran penting dalam menyemarakkan perekonomian Irak. Keberadaan pusat-pusat pendidikan agama di kota Najaf, Irak, dan di kota Qom Iran, juga membuka peluang lebar pertukaran ilmu dan kebudayaan diantara kedua bangsa yang memiliki banyak kesamaan (http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=13863435 diakses pada 23 Maret 2015)

Invasi Amerika Serikat terhadap Irak telah merubah struktur politik di Irak Struktur pemerintahan Irak yang sebelumnya didominasi oleh kelompok muslim Sunni berganti menjadi dominasi muslim syiah yang merupakan mayoritas penduduk Irak. Kuatnya pengaruh kelompok Syiah di Irak dapat dilihat dari arah kebijakan negara itu terhadap Iran. Pemerintah Irak diketahui mendukung pemerintah Iran. Dukungan itu terlihat saat pemerintah Irak mengizinkan

penerbangan dari Iran melewati wilayah udaranya menuju Suriah. Pemerintah Irak juga menolak sanksi yang diberlakukan dunia internasional terhadap Iran karena program nuklir Iran Padahal, Amerika Serikat tidak menginginkan hal itu. Arah kebijakan yang condong ke kelompok Syiah itu juga terlihat dari dukungan Irak kepada rezim Assad di Suriah. Irak berpihak pada pemerintah Suriah yang berasal dari etnis Alawiyah (kelompok minoritas Syiah) yang menentang Amerika dan merupakan sekutu Iran, serta menjalin hubungan dengan faksi politik Syiah di Lebanon Hizbullah (Heydeman,2003:2).

Hubungan antara rakyat Irak dan rakyat Iran juga terjalin melalui pernikahan yaitu banyak lelaki Iran yang menikah dengan perempuan Irak, dan sebaliknya, lelaki Irak menikah dengan perempuan Iran. Banyak pula warga Iran yang kemudian menetap seterusnya atau dalam waktu yang lama, di Irak, karena mereka menemukan kehidupan mereka di sana, demikian pula warga Irak yang menetap di Iran karena menemukan kehidupan mereka di Iran. Di masa kekuasaan Saddam yang memerintah dengan tangan besi, tidak sedikit warga Irak, baik Syiah maupun Sunni, yang lari ke Iran dan menetap serta melakukan aktifitas politik di Iran. Rakyat dan pemerintah Iran menerima dan memperlakukan mereka dengan baik, dan siapa pun dapat menyaksikan dengan jelas, bahkan hingga saat ini, kehidupan warga Irak di sejumlah kota Iran. Kedua negara Syi'ah itu pun saling membuka peluang kerjasama. PM Al-Maliki mengatakan, meningkatkan hubungan dengan Iran bisa membantu pembangunan dan stabilitas Irak. Semakin banyak kerja sama ekonomi antara Iran dan Irak di bidang-bidang ekonomi dan

industri kedua negara (http://www.theguardian.com/world/2014/aug/12/iran-supports-successor-nouri-al-maliki-iraq diakses pada 22 januari 2015

Kedua pemimpin negara juga rutin mengadakan pertemuan membahasa peluang kerjasama ekonomi dan militer. Selain itu, pemerintah Irak-Iran juga membahas perjanjian Irak-AS yang akan diselesaikan pada bulan depan. Sebagaimana diketahui, Irak-AS belum merampungkan perjanjian. AS mengupayakan tidak saja persetujuan untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Irak namun juga hak untuk melakukan operasi militer dari pangkalan-pangkalan itu untuk menyerang negara-negara lain tanpa pembahasan dengan pemerintahan Nouri al-maliki namun Maliki menolaknya karena ingin menjaga hubungan baik dengan Iran.

Terkait hal itu, Maliki juga menjamin Iran bahwa wilayah Irak tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Maliki memastikan Irak tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negeri kaum mullah itu. "Kami tidak akan mengizinkan Irak menjadi pangkalan untuk mengganggu keamanan Iran dan para tetangga," kata media di Iran mengutip ucapan Maliki setelah pembicaraan dengan menteri luar negeri, Manouchehr Mottaki. Ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali hubungan baik di antara kedua negara. Sebelumnya, Irak dan Iran adalah dua negara bertetangga yang pada tahun 1980 terlibat dalam perang. Kini keduanya tidak lagi mempersoalkan Irak-Iran dengan Sunni-Syi'ahnya, sebab Irak kini telah didominasi Syi'ah pasca runtuhnya rezim Saddam Husein

(http://lipsus.kompas.com/jalanjalan/read/2008/06/08/21001483/Irak.Redam.Kekhawatiran.Iran.terhadap.AS diakses pada 23 januari 2015).

Dalam masa pemerintahannya, Maliki membina hubungan baik dengan Iran dan para pemimpinnya, khususnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di Irak sendiri terdapat faksi politik yaitu Aliansi Al Iraqiya umumnya dipandang sebagai pihak yang bertentangan dengan Teheran. Meski dipimpin oleh seorang tokoh Syiah sekuler, mantan perdana menteri Iyad Allawi, aliansi tersebut juga berangotakan banyak kelompok sekuler dan politisi Sunni sekuler serta sejumlah tokoh politik, termasuk Salih al-Mutlaq kelompok ini mendapatkan dukungan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat yang merupakan musuh politik utama Iran dikawasan, namun, hubungan Iran dan Irak tidak sebatas dunia politik, 31 tahun setelah berdirinya republik Islam. Seperti Iran, mayoritas warga Irak menganut paham Syiah. *Iraq-i-Ajam* (Persia Irak, demikian disebutkan menurut sejarah) merupakan tempat kelahiran aliran Syiah. Bagi kaum Syiah Iran, tanah Irak adalah tanah suci, ziarah ke Al Najaf dan Karbala adalah hal yang diimpikan orang-orang Syiah. Puluhan ribu orang Iran berkunjung ke Irak setiap tahunnya. Bahkan kebijakan luar negeri anti Iran oleh Saddam Hussein tidak dapat mengubah hubungan tersebut, yang berakar pada agama, namun juga menjadi hubungan budaya. Penggulingan rezim Saddam Hussein membuka pintu bagi Iran untuk memanfaatkan agama, sejarah, dan hubungan tradisional untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya (Mahally, 2003: 343).

Maka berdasarkan kilasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti pun berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam yang akan tertuang dalam laporan penelitian berjudul

"Kebijakan Luar Negeri Irak terhadap Iran pada masa Perdana Menteri Nouri Al-Maliki (2006-2014)" .

Penelitian ini pula mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah pokok di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), yaitu:

1. Diplomasi HI Timur Tengah, secara langsung memberikan gambaran khususnya terhadap negara Irak dikarenakan Irak sendiri yang menjadi negara utama yang menjadi objek penelitian dan terletak pada bagian Asia Barat.
2. Politik Internasional, membahas mengenai interaksi politik di kancah dunia internasional terutama dengan cara diplomasi dan juga dampaknya yang mana bisa jadi kerjasama ataupun konflik
3. Analisis Politik Luar Negeri merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan interaksi yang melibatkan antar para aktor politik atau pihak-pihak pemerintahan dengan lintas batas negara.
4. Pemikiran Politik Islam, membahas dunia politik dari pandangan syariat Islam yang digunakan oleh negara-negara Islam terutama negara Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membentuk sebuah pertanyaan umum yaitu,

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kebijakan politik luar negeri Irak terhadap Iran pada masa Perdana Menteri Nouri Al-Maliki (2006-2014) ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Untuk memfokuskan pertanyaan umum tersebut,maka diajukan pertanyaan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran ?
2. Bagaimana krisis politik yang terjadi di Irak berpengaruh terhadap hubungan luar negeri Irak terhadap Iran ?
3. Apa kepentingan Irak terhadap Iran ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memahami bagaimana kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran pada masa Nouri al-Maliki.

1.3.2 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan luar negeri Irak terhadap Iran .
2. Untuk memahami bagaimana krisis politik Irak mempengaruhi hubungan Irak terhadap Iran.
3. Untuk memahami sejauh mana kepentingan Irak terhadap Iran dalam hubungan diantara kedua negara.

1.3 Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini di harapkan berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang politik luar negeri Irak
2. Secara praktis penelitian ini dapat :
    a. Memberikan sumbangan kepada mahasiswa lain untuk dijadikan sumber dalam penelitian mengenai kebijakan luar negeri Irak.
    b. sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional

.